

Optimalisasi Peran KPU dalam membangun Partisipasi Masyarakat ¹

Studi Kasus; tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan Hak Suara pada Pemilu Raya

Oleh ;

Agus Prianto, MPA

Tingkat partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Partisipasi politik mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Pada dasarnya apa yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan politiknya, tidak lebih dari sebuah ungkapan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan gerak dari pemerintah. Banyak masyarakat merefleksikannya dalam bentuk partisipasi politik aktif dalam pemilu.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. partisipasi politik adalah aktivitas warga Negara secara pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat individu ataupun kolektif, terorganisasi ataupun spontan, mapan, atau sporadis, damai atau kekerasan, legal ataupun illegal, efektif atau tidak. Partisipasi politik juga bisa berarti kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas dari kegiatan secara langsung atau tidak. Langsung berarti ia sendiri tanpa perantara dan tidak langsung melalui orang-orang yang dapat menyalurkan pemerintah.

Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat pemahaman politik masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka mayoritas warga pasuruan berada pada tidak melek politik, sebagaimana sejumlah 68,87% dan sisanya 31,13% Sebagaimana penjelasan atas pentingnya partisipasi, merupakan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratisasi, dengan menempatkan kekuasaan ditangan rakyat dan memakai pemilu sebagai bentuk penyaluran kekuasaan *distribusi of power* baik pada tingkat eksekutif dan legislative maka dari itu, jika mengkaji kondisi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan masih berada pada tingkat partisipasi semu *pseudo participation*.

Key Word: *distribusi of power, pseudo participation*

¹ Penelitian Didanai Oleh KPU Kabupaten Pasuruan dari anggaran APBN Tahun 2015

A. Latar Belakang

Partisipasi menjadi hal mutlak adanya dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, sejak runtuhnya sistem otoriter mengharuskan adanya partisipasi masyarakat di setiap pembangunan, salah satu bentuk partisipasi terwujud secara aktif didalam Pemilihan Umum, menyalurkan hak suara merupakan hak dasar setiap warga Negara sebagai dasar cerminan pada tatanan Negara yang Demokratis. Partisipasi politik merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan dalam konteks negara dunia ketiga *underdevelopment*, sebab sampai saat ini belum ada keseragaman pemahaman tentang hal tersebut.

Tingkat partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Partisipasi politik mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Pada dasarnya apa yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan politiknya, tidak lebih dari sebuah ungkapan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan gerak dari pemerintah. Banyak masyarakat merefleksikannya dalam bentuk partisipasi politik aktif dalam pemilu.

Dalam pelaksanaan pemilu sebagai pilar Demokrasi menjadi kabur ditengah – tengah adanya praktek politik pragmatis, yakni adanya *money politic*, janji palsu politik dan black propaganda politik atau black campaign. Sehingga

menjadikan masyarakat mengalami krisis legitimasi atas siapa yang mencalonkan dalam bursa pemilu, di sisi lain ada realitas atas pragmatisme masyarakat yang mendasari perilaku aktor politik untuk mendapatkan simpatian dan suara dengan menggunakan kekuatan material² dimana dasar logika ini menjelaskan akan perilaku individu yang rasional *human rationality* hal ini menekankan terhadap perilaku masyarakat yang bertindak berdasarkan untung dan rugi dengan tindakan demikian inilah mendasari perilaku politik *politic behavior* warga tidak pada aspek nilai dan hati nurani melainkan berdasarkan kompensasi apa yang diterima baik individu maupun kelompok, hal ini merupakan pandangan atas rasional manusia yang berprinsi pada perilaku ekonomi dan perilaku politik.

B. Kerangka Teori

Goerge Mason, Amerika Serikat, Robert P Clark, menjelaskan bahwa partisipasi politik selain melalui aktifitas electroral (pemilu) bisa juga melalui lobi, aktifitas organisasional (non parpol), kontak individu dengan pejabat politik, bahkan kekerasan dalam artian upaya mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara melukai fisik seseorang atau merusak property milik pemerintah.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. partisipasi politik adalah aktivitas warga Negara secara pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat individu ataupun kolektif, terorganisasi ataupun spontan, mapan, atau sporadis, damai atau kekerasan, legal ataupun

² Saiful Mujani, 2012 *hal*; 306

illegal, efektif atau tidak. Partisipasi politik juga bisa berarti kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas dari kegiatan secara langsung atau tidak. Langsung berarti ia sendiri tanpa perantara dan tidak langsung melalui orang-orang yang dapat menyalurkan pemerintah.

Biasanya partisipasi politik dipengaruhi oleh *pertama*, budaya politik masyarakat setempat. Ini terkait dengan beberapa nilai yang diyakini oleh masyarakat seperti nilai adat dan nilai tradisi, agama, dll. *Kedua*, partisipasi dipengaruhi juga oleh status social. Status social meliputi pendidikan, ekonomi, dan kelas social masyarakat. Biasanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berpendapatan yang memadai lebih berpartisipasi dibandingkan orang yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. *Ketiga*, partisipasi dipengaruhi juga oleh keterbukaan yang dilakukan pemerintah. Ini berkaitan dengan *political will* pemerintah untuk membuka ruang public yang seluas-luasnya.

Model-model partisipasi politik ada lima yaitu :

1. kegiatan pemilihan, berkaitan dengan setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
2. lobbying, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghubungi pejabat-pejabat dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah orang.
3. kegiatan organisasi, tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. mencari koneksi, biasanya hanya bermanfaat pada sedikit orang. tindakan kekerasan, hal

C. Karakteristik Melek Politik Masyarakat

Sketsa atas fenomena tersebut, dapat kita tarik kesimpulan atas

kondisi melek politik masyarakat kabupaten pasuruan mencapai 31,13%³, selebihnya mencapai 68,87% dari tingkat responden sebanyak 225 yang tersebar di 3 klaster kecamatan yakni kecamatan diwilayah industry (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan), kecamatan diwilayah pesisir (Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, Kecamatan Kraton) dan kecamatan diwilayah pegunungan/terpencil (Kecamatan Lumbang, Kecamatan tutur, kecamatan purowdadi). Dari hasil penelitian menemukan kategorikan pada masyarakat yang tidak melek politik hal ini berarti bahwa rendahnya kekuatan *civil society* dihadapan pemerintah sehingga memiliki implikasi atas nilai-nilai dan bentuk demokrasi di Kabupaten Pasuruan dengan memunculkan atas kesalah pahaman terhadap aktualisasi diri pada partisipasi. Konteks demikian dapat mencederai atau merusak nilai-nilai demokrasi *devisit of democraton* dengan turut serta adanya dan pasif dalam setiap pelanggaran – pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu raya.

Secara eksplisit tingkat melek politik dilihat pada aspek kelembagaan sebagaimana menitik beratkan pada aspek profesi masyarakat, sebagaimana ciri masyarakat modern adalah telah terlembagakan pada profesi-profesi masyarakat. Sebagaimana profesi atau pekerjaan dalam penelitian di kategorikan pada delapan profesi

³ Angka melek politik masyarakat yang bebas nilai *value free* dimana masyarakat secara individu mengartikan politik sebagai dasar atas pengalaman kognitif.

yakni; pejabat publik, ibu rumah tangga, pendidik, aktivis LSM, aktivis desa, pelajar, pengangguran dan karyawan. Dari populasi responden mayoritas adalah karyawan mencapai 54%, pelajar 19%, Ibu rumah tangga 13%, pendidik 6%, pengangguran 4%, aktivis LSM 3% dan pejabat public setingkat kaur dan RW di desa hanya 1 %. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat kabupaten pasuruan sudah mengalami transformasi sosial dari masyarakat tradisional (bertani) berubah ke masyarakat modern (Industri).

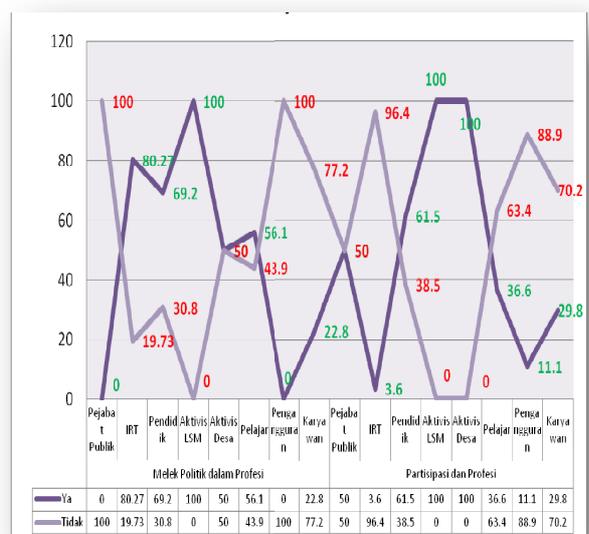
Jika dilihat melek politik atas profesi maka terlihat bahwa profesi sebagai pejabat public, karyawan dan pengangguran berada pada masyarakat yang relatif tidak melek politik, sebagaimana karyawan merupakan mayoritas profesi masyarakat kabupaten pasuruan dimana mencapai 77,2% yang berada pada masyarakat tidak melek politik, lalu diikuti pengangguran dan pejabat public (Kaur dan RW) juga relative tidak melek politik. Selebihnya untuk profesi ibu rumah tangga, pendidik, aktifis LSM, aktifis desa dan pelajar berada pada masyarakat yang melek politik, dimana profesi LSM mayoritas responden mengetahui dan/atau bisa mendefinisikan politik, kemudian diikuti ibu rumah tangga (IRT) 80,27%, pendidik 69,2%, pelajar 56,1% dan kemudian aktivis desa 50% yang juga mengetahui dan/atau bisa mendefinisikan politik.

Dari tingkat melek dan tidak melek pada politik dikabupaten pasuruan, terdapat pola paradoksial terhadap eksistensi partisipasi

masyarakat dalam pemilihan umum. Dimana partisipasi menjadi wujud atas kekuatan masyarakat *citizen power* dan juga partisipasi membutuhkan adanya keterlibatan secara mental dan emosional seseorang atau kelompok masyarakat di dalam situasi dan kondisi tertentu dengan dan atas kehendak sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ndraha⁴ bahwa *partisipasi merupakan keberanian setiap warga Negara didalam menerima tanggung jawab atas suatu usaha didalam pemilu dan merasakan bahwa pemilu merupakan juga bagian dari proses menentukan masa depannya.*

Sebagaimana partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan masih relatif rendah sebagaimana ujia variabel bebas antara melek politik dan keikut sertaan dalam pemilu sebagai bentuk partisipasi, maka terlihat atas sisi paradoksialnya, sebagaimana kita lihat dalam bagan dibawah ini;

Tingkat Melek Politik dan Tingkat Partisipasi Pemilu



⁴ Dalam Ainurokhman 2009,p.46

Dari diagram line diatas, kita bisa menyimpulkan atas kondisi masyarakat yang terjadi, sebagaimana masyarakat yang melek politik akan tetapi tidak berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014 sebagaimana profesi sebagai ibu rumah tangga yang melek politik 80,27% namun yang tidak berpartisipasi dalam pemilu mencapai 96,4% dan pelajar yang melek politik 56,1% namun yang tidak berpartisipasi dalam pemilu mencapai 63,4% maka dapat kita pahami bahwa masyarakat tersebut memahami politik secara negative atau buruk⁵. Selebihnya untuk masyarakat yang berada pada tidak melek politik namun turut aktif dalam pemilu raya tahun 2014 maka terklasifikasikan pada masyarakat yang berpartisipasi semu *pseudo participation* sebagaimana pada profesi pejabat public setingkat Kaur dan RW, aktifis desa dan pengangguran.

Jika melihat atas pemahaman negatif terhadap keberadaan politik, munculnya partisipasi semu masyarakat atas prefrensi pilihannya, maka memiliki implikasi terhadap sikap dalam berpartisipasi ditengah adanya pelanggaran – pelanggaran pemilu di tahun 2014. Sebagaimana data yang kami peroleh atas pelanggaran selama pemilu (politik uang, black propaganda, pencurian start, kampanye terselubung) maka banyak responden yang berpartisipasi dalam pemilu raya, menemukan akan

pelanggaran – pelanggaran tersebut mencapai 50%, sebagiannya 15% tidak mengetahui dan 35% terkategorikan tidak tahu atas pelanggaran tersebut. Hal ini diasumsikan bahwa tidak semua masyarakat yang melek politik dan yang berpartisipasi selalu aktif didalam memonitoring selama proses pemilu berjalan. Hal demikian dimungkinkan atas banyaknya masyarakat yang memahami atas prilaku politik atau politikus selalu negative, sehingga anggapan tersebut secara tidak sadar membentuk sikap tidak cermat dalam fungsi control.

Disamping atas pengetahuan masyarakat terhadap pelanggaran selama pemilu raya, terdapat sikap atas kondisi tersebut, sebagaimana diagram column dibawah ini;



Dari diagram diatas, menunjukkan bahwa masyarakat yang menemukan atas bentuk pelanggaran – pelanggaran mencapai 50%, yang melaporkan hanya 17,92%, yang tidak meloporkan 39,62% dan tidak tahu apa pelanggaran tersebut harus dilaporkan mencapai 42,45%. Sebagaimana informasi dari focus

⁵ Sebagaimana data dilapangan masyarakat mendefinisikan bahwa masyarakat hanya sebagai komoditi politik, yang mengidentikan dengan kepentingan pribadi, golongan tertentu dan juga ada yang mendefinisikan sebagai perbutan uang.

group discussion (FGD)⁶ terdapat ancaman – ancaman bagi warga bila melaporkan atas kegiatan pelanggaran dalam pemilu. Maka perlu adanya sistem yang bisa menjaga kerahasiaan dan sekaligus perlindungan tentang saksi oleh PKPU.

Dari konteks atas ketidak sanggupan atau ke enggan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, merupakan simplifikasi atas kondisi partisipasi semua warga pasuruan, kurang menyadari atas tanggung jawab warga Negara untuk menjaga dan turut serta aktif didalam menciptakan pemilu yang adil, langsung, jujur, bebas dan rahasia (LUBER-JURDIL).

D. Faktor terbentuknya Melek Politik.

Didalam melihat faktor terbentuknya melek politik maka kami menggunakan kerangka analisis kelembagaan *institution analysis* yakni lembaga media sebagai pilar informasi ke masyarakat, KPU sebagai panitia pelaksanaan pemilu dan partai politik sebagai salah satu syarat terlaksananya Pemilu dan sekaligus sebagai pilar Negara demokrasi. Dalam analisis ini digunakan untuk mengembangkan organisasi (PO) sebagai dasar *short guide for organizational assasment* yang berkaitan dengan kinerja organisasi

dalam menodorong pendewasaan politik warga pasuruan.

1.1 Media, KPU dan Partai dalam kontribusi melek politik warga.

Kuatnya media dalam membangun opini public dan sekaligus pendidikan politik masyarakat Pasuruan yakni pada media publik/ forum publik (seminar, debat kandidat, jam'iyah tahlil) berada ditingkat pertama sebanyak 25,76%, yang memberikan kontribusi atas pemahaman politik sebagaimana dorongan atas budaya religious dan patronklien sehingga forum-forum public digunakan sebagai bentuk sosialisasi visi-misi dan program kerja calon dengan didukung budaya warga Nahdliyin. Selanjutnya pada media elektronik sebanyak 21,21%, kemudian sekolah mencapai 19,70% dimana seringkali KPU membuat kegiatan sosialisasi pemilu pada Pemilih Pemula, yang selanjutnya pendidikan lewat teman/rekan mencapai 18,18% sebab budaya cangkruan masyarakat, dan diskusi tertutup/terbatas mencapai 10,61% yakni pada kegiatan yang sifatnya dibatasi dengan sistem keanggotaan. Maka dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui media forum public, televisi, lembaga pendidikan dan fasilitas – fasilitas umum dapat dijadikan refrensi untuk merumuskan program pendidikan melek politik.

Jika kita melihat atas optimasi media yang mudah dijangkau bagi masyarakat yang tidak melek politik, maka media elektronik menjadi media yang di gemari mencapai

⁶ Focus group discussion dilaksanakan pada tanggal 27 agustus 2015 di Hall Meeting Univ. Yudharta Pasuruan dengan menghadirkan partai politik, PPS, PPK, Akademisi dan Komisioner KPU

65%, media cetak 23%, radio 3% sisanya internet dan lain-lainnya. Dari kondisi tersebut dapat disimplifikasikan atas eksistensi media elektronik sebagai wahana membangun melek politik, dengan catatan perlu adanya disain program yang persuasive dan mendidikan masyarakat atas politik tersebut.

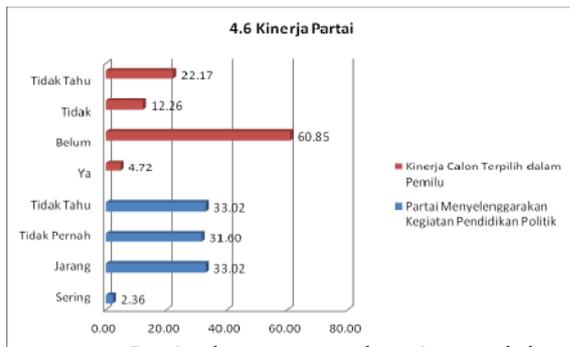
Selanjutnya lembaga KPU sebagai panitia pelaksana pemilu raya yang dibantu PPK, PPS, KPPS dan PPLN sebagai panitia ad hoc, memiliki peran penting didalam mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasis, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa KPU memiliki wewenang, merencanakan dan mempersiapkan pemilu raya, yang dimaksud adalah bagaimana KPU memiliki program strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh KPU Kab. Pasuruan untuk membentuk kegiatan sosialisasi kepada kelompok pemilih pemula.

Jika kita pahami atas responden terhadap kegiatan sosialisasi KPU maka terlihat bahwa belum maksimalnya atas cakupan program tersebut, sebagaimana masyarakat yang tidak tahu atas kegiatan sosialisasi KPU sebesar 53%, kemudian yang tidak pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi sebesar 31% dan untuk yang mengetahui kegiatan sosiaslisasi KPU sebesar 16%, hal ini bisa di pahami bahwa ketidak luasannya atas cakupan kegiatan sosialisasi KPU dan kurang memiliki cakupan yang

strategis, maka memiliki implikasi atas tingginya angka tidak melek politik yang memunculkan atas sikap partisipasi semu dan pemahaman negatif politik.

Selanjutnya untuk partai politik sebagai organisasi kader yang memiliki ideology dan platform perjuangan dan dibentuk dengan tujuan khusus dengan memiliki orientasi, nilai dan cita-cita. Sebagaimana politik merupakan sarana memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan dengan cara yang konstitusionil maka besar eksistensi partai sebagai *political development* pada suprasturktur politik bangsa kita. Dalam konteks political development partai tidak hanya bekerja menjelang pemilu, melainkan memiliki kapabilitas untuk menjaga integritas bangsa, demokrasi dan efektifitas kebijakan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga membangun partisipasi masyarakat.

Pandangan tersebut memberikan sebuah ekspektasi terhadap penyelenggaraan sistem negara yang demokratis. Akan tetapi nuansa tersebut masih butuh ikhtiar dan ijtihad aktor politik partai di Kabupaten Pasuruan, sebagaimana data yang kami peroleh atas kinerja partai didalam pembangunan politik dan sekaligus tingkat kepuasan konstituen yang menjadi responden dalam menilai kinerja calon tersebut. Untuk lebih jelas telah tersajikan didalam diagram bar dibawah ini;



Dari data yang kami peroleh didalam kinerja partai didalam pendidikan politik warga banyak yang tidak tahu tentang program dan tanggung jawab tersebut sebanyak 33,02% dan jarang sebanyak 33,02% untuk yang terkategori tidak pernah mendapat program pendidikan politik masih relatif tinggi yakni 31,60% namun dari responden yang menjawab sering ada program pendidikan politik sebanyak 2,36%. Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa kinerja partai masih belum maksimal dan sustainable.

Untuk kinerja calon terpilih dalam pemilu juga menunjukkan belum puas terhadap kinerjanya, sebagaimana data dilapangan bahwa 60,85% menjawab belum puas, tidak tahu atas kinerja sebesar 22,17%, dan untuk tidak puas mencapai 12,26% dan sisanya 4,72% menjawab puas. Dari data tersebut maka diasumsikan bahwa kinerja elit politik yang menang dalam pemilu masih dianggap kurang maksimal, sebagaimana elit politik merupakan kader politik sehingga mekanisme dalam pemilihan bursa oleh partai masih butuh seleksi secara maksimal.

1.2 Tingkat mengenal pada Calon dalam Pemilu

Didalam tahun 2014 terdapat banyak agenda pemilu dan sistem pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat baik ditingkat eksekutif

dan legislatif pada pemilu pusat dan daerah, hal ini merupakan perkembangan baik dalam prespektif nilai-nilai demokrasi, akan tetapi tingkat melek politik di Kabupaten Pasuruan relatif rendah dan terdapat sistem pemilu muncul nama yang banyak, tak jarang konstituen tidak mengenal dan bahkan tidak tahu siapa yang mereka pilih sebagai wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi tersebut terlihat dari penelitian melek politik ini, dimana tingkat mengenal calon pemilu pada pilpres tahun 2014 dan pilkada tahun 2013 yang relative calon tidak bervariasi seperti halnya legislatif, sebagaimana data dibawah ini;



Konteks demikian dapat diasumsikan bahwa masyarakat dalam pemilihan pilpres tingkat mengenal masih relative tinggi, hal ini bisa disebabkan karena pemilu pilpres dalam model kampanyenya mengaktifkan pada media sosial (Televisi, SMS Center dan Media cetak) sebagaimana dasar hasil penelitian kami bahwa bursa calon dikenal oleh responden dari media elektronik sebesar 88%, dan 6%

dari teman atau rekan. Sebagaimana yang diperoleh data dari penelitian terkait fasilitas apa yang dijadikan oleh responden mengenal atas calon dalam Pilpres.

Kondisi diatas berbeda jika kita melihat akan pelaksanaan Pemilukada pada tahun 2013, dimana tingkat mengenal calon relative rendah dengan nilai 15,57%, kemudian yang berada pada posisi tidak mengenal pada calon 62,26% dan disusul tidak tahu atas calon dalam pemilukada 21,70% dan absen 0,47%. Dalam konteks pemilukada masyarakat banyak yang terklasifikasi pada tidak mengenal dan tidak tahu pada calon bursa pemilukada

Berdasarkan tingkat mengenal calon yang relatif rendah maka dapat kita analisis atas bahwa kampanye sebagai media untuk menyampaikan pesan politiknya sebagaimana data diatas sebesar 37% yang menggunakan kampanye masih diunggulkan untuk menggalang massa, padahal masyarakat pasuruan sudah banyak yang beralih ke masyarakat industry dengan berprofesi sebagai buruh, sehingga waktu selain kerja digunakan untuk kegiatan rumah dan keluarga. Yang kedua media massa televisi dan radio lokal sebesar 27% menggunakan media elektronik, Sebagaimana pengenalan calon Bupati teman/rekan sebesar 24% dan yang lewat jamiyah sebesar 9% yang artinya adalah, budaya komunal atau kekerabatan dan pengenalan calon masih kuat sehingga mampu memberikan suatu optimasi terhadap pemilih.

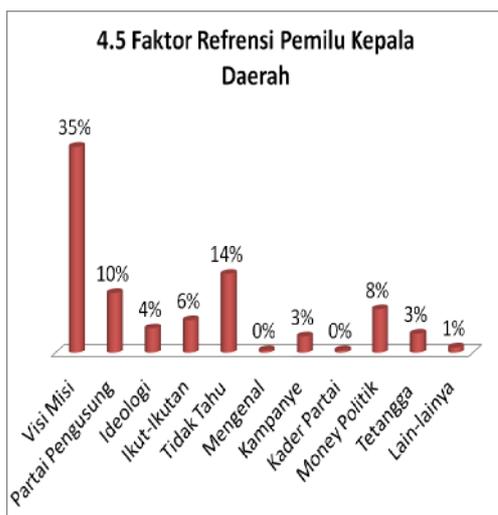
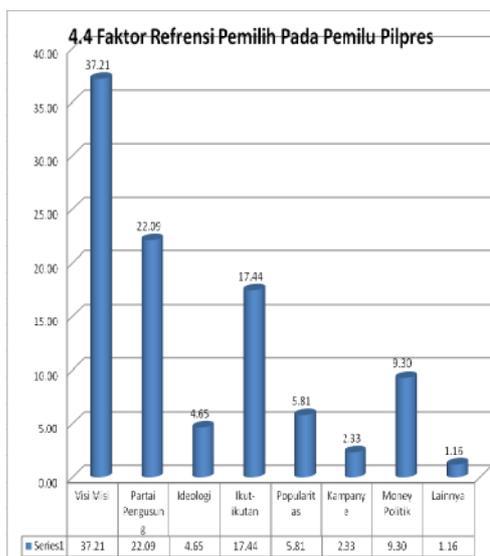
Begitu juga jamiyah, dimana mayoritas warga pasuruan adalah Nahdliyin maka pengenalan lewat media jam'iyah relative masih digunakan, yang sering ditemukan pengenalan calon adalah jam'iyah fatayat, muslimat, tahliq perempuan.

1.3 Faktor referensi pemilih dalam Pemilu Raya

Sebagaimana tingkat melek politik dan tingkat partisipasi warga Pasuruan, maka perlu dilihat apa yang mendasari seseorang untuk menentukan pilihannya pada pemilu raya, sebagaimana faktor referensi pemilih pada pemilu sebagaimana pada pemilu Presiden tahun 2014 dan Pemilihan Bupati ditahun 2013, merupakan pemilihan yang bisa dikaji kedalam ranah *rational choice*. Secara psikologis manusia merupakan makhluk rasional dimana aksentuasi perilaku rasional dicirikan dalam teori ekonomi yang memandang rasional sebagai konsistensi internal terhadap pilihan dan yang lain adalah mengidentifikasi rasional dengan *maksimalisasi kepentingan-diri*.

Dari kerangka tersebut referensi pemilih harus lekat dengan yang namanya kepentingan diri, jika sebuah rasionalitas tidak berdasarkan atas optimasi diri, maka kemungkinan kondisi masyarakat pada posisi rasional terkekang, dimana kondisi ini menggambarkan atas keterbatasan informasi, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap program politik sehingga disaat membuat keputusan untuk memilih satu calon masih

berada pada posisi *satisficer*⁷. Rendahnya tingkat pemahaman politik, dan partisipasi yang relative tinggi namun banyak yang kurang mengetahui dan mengenal para calon, maka kondisi tersebut mencerminkan sebuah kondisi *bounded rasonaity* atau terkekangnya rasionalitas masyarakat., untuk lebih jelasnya kami tampilkan pada diagram kolom pada pemilihan Pilpres dan Pilkada dibawah ini.



Dari diagram diatas terlihat atas faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memahami atas politik, dari kedua diagram batang diatas, tampak faktor visi misi dan proker (program kerja) dari pemilu Presiden dan Bupati menjadi relative tinggi sebagai rujukan oleh masyarakat, yakni 37,28% pada pemilu Presiden dan 35% pada pemilu kepala daerah Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya terdapat keberbedaan atas faktor refrensi masyarakat dalam pemilu Presiden dan Kepala Daerah.

Untuk pemilu presiden faktor melek politik selanjutnya adalah faktor partai politik mencapai 22,09%, kemudian faktor ikut-ikutan mencapai 17,44% dimana disimpulkan atas masa mengambang dengan tidak memahami atas hak dasar setiap warga Negara dalam pemilu sebagai penentu nasibnya selama 5 tahun kedepan, kemudian faktor money politic mencapai 9,30%, faktor popularitas mencapai 5,81%, faktor ideology terdapat 4,65% selanjutnya kampanye terdapat 2,33%.

Berbeda dengan kondisi pada pemilu Kepala Daerah, dimana setelah peringkat pertama atas faktor yang membentuk pemahaman politik adalah visi misi dan proker, dilanjutkan dengan faktor tidak tahu sebesar 14%, kemudian faktor partai pengusung 10%, faktor money politik 8%, faktor ikut-ikutan 6%, faktor ideology 4%.

Dari beberapa faktor atas pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, terbanyak adalah faktor refrensi dari visi misi dan program kerja, maka dapat ditarik garis merah atas kondisi rendahnya pemahaman masyarakat dan tingginya angka partisipasi semu *pseudo participation* maka kondisi masyarakat

⁷ Kondisi *satisficer* adalah kondisi warga disaat di bilik suara untuk menyalurkan hak politiknya sebagai pengambil keputusan dalam kondisi tidak optimal (Herbet A. Simon, 1965)

kabupaten pasuruan pada rationalitas yang terkekang *bounded rationality*.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat pemahaman politik masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka mayoritas warga pasuruan berada pada tidak melek politik, sebagaimana sejumlah 68,87% dan sisanya 31,13% Sebagaimana penjelasan atas pentingnya partisipasi, merupakan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratisasi, dengan menempatkan kekuasaan ditangan rakyat dan memakai pemilu sebagai bentuk penyaluran kekuasaan *distribusi of power* baik pada tingkat eksekutif dan legislative maka dari itu, jika mengkaji kondisi tingkat partisipasi masyarakat diKabupaten Pasuruan masih berada pada tingkat partisipasi semu *pesudo participation*. Sebagaimana terklasifikasi atas profesi pekerjaan, terdapat tingginya nilai partisipasi tanpa ada pemahaman terhadap politik atau sebaliknya, pemahaman politik yang tinggi namun tingkat partisipasi rendah maka mencerminkan atas pemahaman masyarakat terhadap politik adalah negative atau buruk. sebagaimana profesi; Ibu Rumah Tangga (IRT), Karyawan/Buruh dan Pelajar. Dan untuk partisipasi semu masyarakat terklasifikasi meliputi profesi sebagai; Pejabat Publik desa (Kaur desa/RW), aktivis desa (Kader PKK/Kader

Pasyandu), pengangguran dan Pendidik/guru.

Paradoksinya atas melek politik dan tingkat partisipasi masyarakat memiliki kecenderungan tidak aktif didalam mengawal berjalannya pemilu, sebagaimana data yang diperoleh bahwa penemuan atas pelanggaran pemilu yang melaporkan sangat rendah yakni 17,92%, dibandingkan masyarakat yang tidak melaporkan dan tidak tahu jikalau terdapat pelanggaran harus dilaporkan ke Panwas.

Didalam proses pemilu setiap warga menyalurkan hak *vote* guna memilih calon yang bisa diberikan amanah rakyat, selama proses berjalan barang tentunya terdapat faktor penyebab tingkat melek politik atau pengetahuan tentang politik, maka hasil yang kami temukan didalam Pemilihan Presiden dan pemilu kada terdapat faktor visi misi atau program kerja masih menjadi refrensi mayoritas pemilih. Ditengah partisipasi semu terhadap visi misi dan program kerja, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berada pada kondisi rationalitas terkekang atau *bounded rationality* yakni hak suara politiknya dalam pemilu tidak didasarkan pada informasi dan pengalaman secara seksama.

2. Rekomendasi

Dari hasil penelitian maka, diperlukan kebijakan guna membangun wawasan dan kedewasaan politik masyarakat sebagaimana berikut;

1. KPU Kabupaten Pasuruan perlu membangun kerjasama antar

stakeholder didalam membangun kedewasaan politik masyarakat dengan mendirikan pendidikan politik masyarakat yang melembaga.

2. Muatan materi pada pendidikan politik masyarakat meliputi materi-materi yang disampaikan berkaitan tentang tema *pengertian politik, hak dan kewajiban warga negara, urgensitas Partisipasi dalam negara demokrasi*.
3. KPU perlu sosialisasi berbasis pada profesi yang dilaksanakan secara sustainable yang bekerja sama dengan partai politik, dan PPS sebagai ujung tombak di masyarakat.
4. KPU Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan media televisi dan media cetak lokal untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan memproduksi program-program yang menarik sebagai sarana pendidikan melek politik. dengan menampilkan layanan iklan tentang ;
 - a. Tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu
 - b. Ajakan tentang wajib memilih sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab dengan memastikan dirinya tercatat dalam daftar pemilih tetap, memastikan dirinya datang ke TPS dan mencoblos sesuai dengan hati nuraninya.
 - c. Mengajarkan untuk selalu mengawasi dan melaporkan pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
5. Partai politik dikabupaten pasuruan perlu melakukan program kerja secara maksimal, continue, riil dan kongkrit sebagai bentuk platform

perjuangan. Selain itu Partai Politik untuk selalu evaluatif atas kinerja anggota dewan dari kadernya yang terpilih, guna membangun kepercayaan *trust* pada masyarakat.

Refrensi

1. Samoedra, W. 2006. Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik .Yogyakarta: Gava Media
2. Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Azasi, Reformsi Hukum. Jakarta. The Habibie Center.
3. Mizani, Saiful dkk. 2012, *Suara Rakyat*. Mizan. Jakarta
4. Rohman. Ainur dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang. Program Sekolah Demokrasi.
5. Gunawan. Jamil dkk. 2005. *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta. LP3ES.
6. Djadijono. M dkk. 2006. *Membangun Indonesia dari daerah*. Jakarta. CSIS.]